

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lainnya sebagai berikut :

1. Penyelesaian konflik pertanahan melalui badan peradilan pidana, peradilan tata usaha negara dan peradilan perdata tidak memberikan perlindungan hukum secara utuh tentang pihak yang memiliki hak yang sah atas tanah yang dipersengketakan.
2. Akibat hukum dari penyelesaian konflik pertanahan melalui badan peradilan tidaklah memberikan kepastian hukum tentang hak atas tanah Kaveling 63 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, karena belum adanya putusan badan peradilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat tentang hak atas tanah Kaveling 63 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan.

V.2 Saran

Dengan memperhatikan pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, diberikan beberapa saran antara lainnya sebagai berikut :

- a. Karena kepastian hukum dan perlindungan hukum tentang pihak yang memiliki hak yang sah atas tanah yang dipersengketakan tidaklah diperoleh melalui badan peradilan tata usaha negara dan badan peradilan perdata sebagai badan peradilan, diperlukan untuk memberikan alternatif adanya peradilan pertanahan sebagai badan penyelesaian sengketa pertanahan. Walau agak berbau idealis, namun kepada pihak legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang disarankan untuk merancang dan menetapkan adanya peradilan khusus pertanahan sebagai bagian dari badan peradilan. Tujuannya agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang utuh tentang pihak yang memiliki hak yang sah atas tanah yang dipersengketakan.

- b. Dengan banyaknya penyebab sengketa yang menjurus sebagai konflik pertanahan, disarankan kepada lembaga peradilan terutama peradilan perdata untuk lebih peka terhadap kebutuhan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang didambakan oleh semua pencari keadilan melalui badan peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurahman, 2004, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundangan-undangan Agraria Indonesia*, Akademik Presindo, Jakarta.
- , 1995, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.
- Ali, Ahmad, 2009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Persada Media Group, Jakarta.
- , 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Chomzah, Ali Ahmad, 2002. *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung.
- Djaja, Ermansah, 2008, *Hukum Hak Kekayaaan Intelektual*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Fauzan, Achmad dan Suhartanto, 2009, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, Irama Widya, Bandung.
- Hajon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1989, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- , 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria : Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

- Hutagalung, Arie S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, *Profil Lembaga Negara Rumpun Yudikatif*.
- Librayanto, Romi, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makasar.
- Marpaung, Leden, 1997, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mulyata, Jaka, 2015, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Tesis*, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mustafa, Marni Emmy, 2013, *Pengadilan Pertanahan Untuk Menunjang Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Prahara Pertanahan*, Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional, Jakarta,.
- Pipin, Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Poerwadarminto, W.J.S, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prajogo, Soesilo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyidi, Lili dan IB Wya Putra, 1993, *Hukum sebagai suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Redaksi Citra Umbara, 2003, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, Citra Umbara, Bandung.

- R.Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sagala, Budiman B., 1982, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, K.Wantjik, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan dan Menegakkan Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Semedi, Bambang, 2013, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Widyaaiswara pada Pusdiklat Bea Dan Cukai, Edisi Desember 2013, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Penerbit Kompas Gramedia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman, Erman, 2004, *Kitab Undang Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Fokusmedia, Bandung.
- Soerodibroto, Soenarto, 1999, *KUHP dan KUHPA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodjo, 2003, *Proses Pendaftaran Tanah*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarief, Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Citra Adhitya Bhakti, Jakarta.
- Wantu, Fence M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Wirjono Projodikuro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Zainudin, Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10.

-----, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.

-----, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.

-----, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

3. Sumber Lain

Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/duduk>, diakses 21 Maret 2017